



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi S2 Hukum**

**Kode  
Dokumen**

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																		
Tanggung Gugat Pemerintah	7410802019	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2	P=0	ECTS=4.48	2	1 Januari 2024																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																			
	Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H.		Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H.			Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																								
	CPL-5	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori dan filsafat hukum																																																							
	CPL-6	Mampu menelaah dan menafsirkan teori dalam perancangan peraturan, perancangan keputusan, perancangan kontrak, dan hukum formil/hukum acara dalam rangka menegakkan hukum																																																							
	CPL-7	Menguasai metode penelitian hukum, penalaran dan mampu melakukan penulisan hukum secara benar;																																																							
	CPL-8	Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dan solutif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya																																																							
	CPL-11	Mampu bertanggungjawab atas putusan dan hasil kerja dalam menyelesaikan masalah hukum dan mengevaluasinya																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																								
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, mengidentifikasi jenis-jenis tindakan melawan hukum serta dasar hukum tanggung gugat negara dan pemerintah dalam sistem hukum Indonesia.																																																							
	Matrik CPL - CPMK																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CPMK</th> <th style="width: 15%;">CPL-5</th> <th style="width: 15%;">CPL-6</th> <th style="width: 15%;">CPL-7</th> <th style="width: 15%;">CPL-8</th> <th style="width: 15%;">CPL-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </tbody> </table>						CPMK	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-11	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓																																						
	CPMK	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-11																																																			
	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓																																																			
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
	CPMK	Minggu Ke																																																							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																									
CPMK-1																																																									
Deskripsi Singkat MK	mata kuliah ini membahas dan memberikan dasar mengenai kewenangan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan diikuti dengan resposibility dan liability																																																								
Pustaka	Utama :																																																								
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: sebuah studi kasus tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu</li> <li>Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Jakarta, Rajawali Press</li> <li>Tatiek Sri Djatmiati, Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara, Makalah disampaikan pada Lokarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 28-30 Oktober 2008</li> <li>M.A. Moegni Djojodirjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita</li> <li>2. P. M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010</li> <li>3. Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.</li> <li>4. 4. Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Pemerintahan</li> </ol>																																																								
	Pendukung :																																																								

		1. 1. jurnal ilmiah terkait dengan tanggung gugat pemerintahan					
<b>Dosen Pengampu</b>		Tamsil, S.H., M.H. Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara	1.1. pemahaman tentang konsep tanggung jawab pemerintahan 2.2. mampu menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara	<b>Kriteria:</b> pemahaman tentang konsep tanggung jawab pemerintahan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif		rapkan kon 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara <b>Pustaka:</b> 3. Hufron and S. Hadi, <i>Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat</i> . Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.	5%
2	mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara	1.1. pemahaman tentang konsep tanggung jawab pemerintahan 2.2. mampu menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara	<b>Kriteria:</b> pemahaman tentang konsep tanggung jawab pemerintahan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif		rapkan kon 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara <b>Pustaka:</b> 3. Hufron and S. Hadi, <i>Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat</i> . Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.	5%
3	mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung gugat perdata tanggung gugat pemerintah	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung gugat perdata tanggung gugat pemerintah <b>Pustaka:</b> 3. Hufron and S. Hadi, <i>Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat</i> . Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.	5%

4	mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung gugat perdata tanggung gugat pemerintah	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung gugat perdata tanggung gugat pemerintah <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.</i>	5%
5	mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.</i>	5%
6	mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 2. P. <i>M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010</i>	5%
7	mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 1. <i>Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia:</i>	5%

sebuah studi kasus tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu  
Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Jakarta, Rajawali Press  
Tatiek Sri Djatmiati, Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara, Makalah disampaikan pada Lokarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airalangga, Surabaya, 28-30 Oktober 2008  
M.A. Moegni Djodirjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita

8	UTS	evaluasi	<b>Kriteria:</b> analisis kasus  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	daring 100	<b>Materi:</b> UTS <b>Pustaka:</b> 4. <i>Peraturan Perundang- undangan tentang Administrasi Pemerintahan</i>	15%
9	mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan	analisis kasus yang terkait problem normatif UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	daring 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufiron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.</i>	5%
10	mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan	analisis kasus yang terkait problem normatif UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	daring 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b>	5%
11	mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	Mahasiswa memiliki ketepatan dalam menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa memiliki Kemampuan dalam menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	daring 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 2. P. <i>M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010</i>	5%
12	1.mampu menerapkan prosedur dan tahapan pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah 2.mampu membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional)	1.1. menerapkan dalam pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah 2.2. membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional)	<b>Kriteria:</b> analisis  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	daring 100	<b>Materi:</b> mampu menerapkan prosedur dan tahapan pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufiron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.</i>  <b>Materi:</b> membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional) <b>Pustaka:</b> 1.	5%

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: sebuah studi kasus tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Jakarta, Rajawali Press

Tatiek Sri Djatmiati, *Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara*, Makalah disampaikan pada Lokarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airalangga, Surabaya, 28-30 Oktober 2008

M.A. Moegni Djodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

13	<p>1.mampu menerapkan prosedur dan tahapan pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah</p> <p>2.mampu membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional)</p>	<p>1.1. menerapkan dalam pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah</p> <p>2.2. membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional)</p>	<p><b>Kriteria:</b> analisis</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>		daring 100	<p><b>Materi:</b> mampu menerapkan prosedur dan tahapan pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah</p> <p><b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional)</p> <p><b>Pustaka:</b> 2. P. M. Hadjon, <i>Hukum Administrasi dan Good Governance.</i> Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010</p>	5%
14	mampu menganalisis kapita selekta kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi	analisis kasus tanggung gugat pamerintah dan maladministrasi	<p><b>Kriteria:</b> analisis kasus</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>		daring 100	<p><b>Materi:</b> mampu menganalisis kapita selekta kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi</p> <p><b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.</p>	5%
15	mampu menganalisis kapita selekta kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi	analisis kasus tanggung gugat pamerintah dan maladministrasi	<p><b>Kriteria:</b> analisis kasus</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>		daring 100	<p><b>Materi:</b> mampu menganalisis kapita selekta kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi</p> <p><b>Pustaka:</b> 2. P. M. Hadjon, <i>Hukum Administrasi dan Good Governance.</i> Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> mampu menganalisis kapita selekta kasus tanggung gugat pemerintah dan</p>	5%

maladministrasi

**Pustaka: 1.**

*Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: sebuah studi kasus tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu*

*Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Jakarta, Rajawali Press*

*Tatiek Sri Djatmiati, Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara, Makalah disampaikan pada Lokarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airalangga, Surabaya, 28-30 Oktober 2008*

*M.A. Moegni Djodirjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita*



16	Ujian Akhir Semester	Ketepatan dan kemampuan mahasiswa dalam analisis dan penguasaan materi	<b>Kriteria:</b> Sangat baik, baik, cukup, kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	UAS 2 X 50		<b>Materi:</b> Ujian Akhir Semester <b>Pustaka:</b> 4. <i>Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Pemerintahan</i>	15%
----	----------------------	--	--	---------------	--	--	-----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	45%
2.	Penilaian Portofolio	25%
3.	Tes	30%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 2 Desember 2024

Koordinator Program Studi S2  
Hukum



Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.  
NIDN 0027126003

UPM Program Studi S2 Hukum



Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.  
NIDN 0007088801

**VALID**